

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2018**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA
2019**

5.1 Kesimpulan

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan untuk melihat kinerja urusan pemerintah dimata masyarakat.
- b. Hasil survey indeks kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bangka terkait penilaian masyarakat sudah pada nilai **68,51** atau kategori **B (Baik)**. Untuk urusan pemerintah Bidang Kependudukan dengan nilai 74,08 (B), Bidang Pendidikan dengan nilai 74,68 (B), urusan Pendidikan dengan nilai 71,15 (B), urusan Penanaman Modal dengan nilai 70,88 (B), urusan Pemuda dan Olah raga dengan nilai 70,79 (B), urusan Pariwisata dan Kebudayaan dengan nilai 70,72 (B), urusan Kesehatan dengan nilai 70,33 (B).
- c. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangka dapat juga dilihat berdasarkan wilayah administratif (kecamatan). Dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka 8 kecamatan pada kategori B (Baik). Wilayah kecamatan yang indeks kepuasan masyarakat mendapat kategori B antara lain, Kecamatan Sungailiat, Kecamatan, Pemali, Kecamatan Merawang, Kecamatan Mendo barat, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Bakam, Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan

Belinyu. Sedangkan wilayah kecamatan dengan IKM kategori C tidak ada lagi di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka. Adapun nilai IKM per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Nilai IKM Urusan Pemerintah per Kecamatan

URUSAN PEMERINTAH WAJIB DAN PILIHAN	IKM BANGKA	IKM KEC. SUNGAILIAT	IKM KEC. PEMALI	IKM KEC. MERAWANG	IKM KEC. MENDO BARAT	IKM KEC. PUDING BESAR	IKM KEC. BAKAM	IKM KEC. RIAU SILIP	IKM KEC. BELINYU
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	74,68	74,93	69,20	79,03	73,46	77,40	75,78	72,35	74,02
PENDIDIKAN	71,15	71,77	74,32	70,90	68,55	71,00	75,70	70,68	68,94
PENANAMAN MODAL	70,88	64,63	67,28	66,34	69,23	66,30	66,22	66,93	65,20
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	70,79	65,09	68,40	66,71	69,29	68,00	67,33	69,41	65,84
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	70,72	66,67	63,74	67,77	69,88	65,07	67,11	68,02	66,23
KESEHATAN	70,38	70,33	64,96	70,46	70,64	70,05	74,41	70,70	70,01
SOSIAL	70,33	65,37	65,37	65,24	67,94	68,40	70,67	70,85	65,16
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	69,94	66,20	62,59	65,86	69,74	70,70	69,00	71,57	71,10
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	69,72	71,46	62,59	66,55	70,85	72,00	70,33	70,52	71,14
PERTANAHAN	69,62	67,01	65,88	68,37	68,85	66,47	67,46	67,54	66,21
TENAGA KERJA	69,48	66,20	67,28	65,59	66,10	66,80	66,49	67,52	67,07
PERIKANAN	69,34	65,78	67,59	65,10	69,41	73,40	68,67	67,71	65,53
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	69,05	66,80	63,83	65,03	67,02	67,10	69,00	67,45	64,72
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	68,86	65,80	74,94	67,72	69,60	70,60	71,78	68,30	64,11
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	68,41	67,35	66,79	67,41	67,37	65,15	68,44	67,97	67,97
PANGAN DAN PERTANIAN	68,03	65,67	70,84	65,49	69,13	67,08	66,76	67,22	66,03
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	66,43	62,09	70,31	66,00	68,86	66,20	66,22	69,02	66,06
PERDAGANGAN	65,13	65,35	65,35	65,52	66,35	67,07	67,21	68,63	67,02
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SERTA URUSAN	64,87	66,21	65,17	65,53	71,68	64,08	69,36	65,60	65,02
PERHUBUNGAN	63,75	66,25	64,07	65,48	69,01	65,65	66,11	67,12	65,87
USAHA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	63,54	64,98	68,77	67,38	69,12	66,20	66,22	66,47	65,81
LINGKUNGAN HIDUP	63,16	66,43	65,06	68,28	70,40	66,30	67,89	67,12	65,12
IKM	68,51	66,93	67,02	67,69	69,80	67,64	69,21	68,37	67,01

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan beberapa permasalahan diatas, maka perlu disampaikan beberapa hal sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja urusan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Bangka , antara lain sebagai berikut :

- Untuk mewujutkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai keberadaan OPD beserta seluruh tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut.

- b. Mengingat pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan kinerja secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka survey Indeks Kepuasan Masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan dan periodik di tahun-tahun mendatang. Sehingga berdasarkan hasil survey IKM tersebut, OPD dapat melakukan perbaikan mutu pelayanan dan kinerja sesuai hasil penilaian dari masyarakat.